



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Kkp
2026
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

panganbiru

08
PRIORITY GROWTH



DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



TIM PENYUSUN

Pengarah:

Pung Nugroho Saksono

Penyusun:

Saiful Umam

Purwono B. Santoso

M. Alief Farid

Aditya Sudirman

Samsu Muarip

Ena Marlina

Anita R.D. Kusumawati

Elfa S. Ramadhan

Harfy B. Alia Putri

Dewi Purwati

Tri Susilowati

Febricaulia Rembulan

Ahmad Firdaus

Iko Panji Rukmana

Putri Rahmadanti

Ahmad D. Muttaqin

Nita Puspitasari

Lidya Novianti

Mei Wulandari

Vandra Anggriawan

Hadi Purwanto

Multi Nopiatin

Selmia K. Purwanto

Kontributor:

Tim Pengelolaan Kinerja lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Sitasi:

S. Umam, P.B.Santoso, M.A. Farid, A. Sudirman, S. Muarip, E. Marlina, A.R.D. Kusumawati, E.S. Ramadhan, H.B.A. Putri, D.Purwati, T.Susilowati, F.Rembulan, A.Firdaus, I.P.Rukmana, P.Rahmadanti, A.D.Muttaqin, N.Puspitasari, L.Novianti, M.Wulandari, V.Anggriawan, H.Purwanto, M.Nopiatin, S.K.Purwanto (2026). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2026*. Jakarta: Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan.

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LKj) organisasi merupakan wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi. Hal tersebut telah diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Proses penyusunan LKj ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada Tahun 2025, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berhasil menunjukkan capaian kinerja yang membanggakan, dengan perolehan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **111,56%** dengan predikat **"Istimewa"**. Keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja keras, dedikasi, dan kolaborasi seluruh unsur pimpinan serta pegawai di lingkungan Ditjen PSDKP. Atas capaian tersebut, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Ditjen PSDKP.

Saya meyakini, meskipun dengan tantangan dinamika lingkungan strategis yang penuh dengan *Volatility* (volatilitas), *Uncertainty* (ketidakpastian), *Complexity* (kompleksitas), dan *Ambiguity* (ambiguitas) namun dengan semangat kebersamaan dan berpegang pada semboyan **"Pantang Tercela,"** kita akan mampu menuntaskan setiap amanah dan penugasan dengan sebaik-baiknya. Sebagai garda terdepan dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Ditjen PSDKP memiliki peran strategis dalam mengawal keberhasilan ekonomi biru guna mewujudkan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam **menjaga laut, menopang ketahanan pangan, dan berkontribusi pada pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.**

Semoga setiap langkah dan upaya yang kita lakukan senantiasa membawa manfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, serta menghadirkan keberkahan bagi seluruh keluarga besar Ditjen PSDKP.

Jakarta, 31 Januari 2026

Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M.

Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	3
B. Isu Strategis Pengawasan SDKP	5
C. Sistematika Laporan Kinerja	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis Ditjen PSDKP	8
B. Perjanjian Kinerja	9
C. Pengukuran Kinerja	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Capaian Kinerja Pengawasan SDKP.....	11
B. Evaluasi dan Analisis.....	12
C. Efisiensi	34
D. Akuntabilitas Keuangan.....	34
BAB IV PENUTUP	36
A. Kesimpulan.....	36
B. Langkah-Langkah Perbaikan	36
LAMPIRAN	37



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kebijakan Ekonomi Biru Kementerian Kelautan dan Perikanan	3
Gambar 2. Struktur Organisasi Ditjen PSDKP	4
Gambar 3. Struktur Organisasi UPT Ditjen PSDKP	5
Gambar 4. Sosialisasi Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2025 di Tegal, Jawa Tengah	13
Gambar 5. Kegiatan Workshop Strategi dan Aksi Pokmaswas dalam Mendukung Pengawasan Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan di Manado dan Pembinaan Pokmaswas di Banten	15
Gambar 6. Overview media sosial Instagram Ditjen PSDKP	17
Gambar 7. Contoh konten media sosial Instagram Ditjen PSDKP yang memiliki <i>engagement</i> tinggi tahun 2025.	17
Gambar 8. Contoh konten media sosial Facebook Ditjen PSDKP yang memiliki <i>engagement</i> tinggi tahun 2025	18
Gambar 9. Contoh pemantauan SDKP di WPPNRI	21
Gambar 10. Pengawasan pulau-pulau kecil di Kabupaten Pandeglang, Banten, serta pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut di Kabupaten Badung, Bali	22
Gambar 11. Operasi Pesawat Patroli	25
Gambar 12. Rapat pengenalan sanksi administrasi	30
Gambar 13. Infografis realisasi anggaran Ditjen PSDKP	35



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian IKU Ditjen PSDKP Tahun 2025	vi
Tabel 2. Sistematika Laporan Kinerja	7
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2025 (awal).....	9
Tabel 4. Revisi Perjanjian Kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2025	10
Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Ditjen.PSDKP Tahun 2025	11
Tabel 6. Target dan realisasi IKU Indeks kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan	12
Tabel 7. Target dan capaian IKU Persentase keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	13
Tabel 8. Target dan capaian IKU Tingkat keterlibatan masyarakat (<i>Engagement Rate</i>) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.....	15
Tabel 9. Target dan capaian IKU Indeks pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	19
Tabel 10. Target dan capaian IKU Indeks operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan Perikanan	22
Tabel 11. Penghitungan capaian indeks kinerja pesawat Patroli Periode Tahun 2025	24
Tabel 12. Target dan capaian IKU Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP	26
Tabel 13. Penghitungan indeks kesiapan sarana pengawasan SDKP tahun 2025	27
Tabel 14. Penghitungan indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP	28
Tabel 15. Target dan capaian IKU Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan	28
Tabel 16. Penghitungan capaian indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan	29
Tabel 17. Penghitungan capaian indeks penyelesaian penyidikan TPKP	30
Tabel 18. Rincian jumlah tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani pada tahun 2025 ...	30
Tabel 19 Penghitungan capaian indeks penerapan sanksi administrasi sektor KP	31
Tabel 20. Persentase penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	31
Tabel 21. Penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan SPKP	31
Tabel 22. Penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Non-SPKP	32
Tabel 23. Target dan realisasi IKU Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP	32



IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Ditjen PSDKP digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2025. Melalui perjanjian kinerja tersebut, Ditjen PSDKP menetapkan 5 (lima) Sasaran Program dan 8 (delapan) Indikator Kinerja yang terdiri dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 1 (satu) Indikator Kinerja Manajemen (IKM) yang menjadi target Ditjen PSDKP di tahun 2025.

Nilai Kinerja Organisasi Ditjen PSDKP Tahun 2025 mencapai **111,56%**, dengan kategori “Istimewa” yang diperoleh dari capaian 8 (delapan) indikator kinerja yang ditetapkan targetnya pada tahun 2025. Secara ringkas capaian kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian IKU Ditjen PSDKP Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	Persentase
1	Indeks kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan (indeks)	80	88,44	110,55%
2	Nilai keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	90	95,5	106,11%
3	Tingkat keterlibatan masyarakat (<i>Engagement Rate</i>) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	>1	1,08	108%
4	Indeks pengawasan sumber daya kelautan perikanan (indeks)	75	96,92	120%
5	Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (indeks)	92	95,73	104,05%
6	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (indeks)	80	88,68	110,85%
7	Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan (indeks)	80	92,33	115,41%
8	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	86	91,76	106,70%

Keberhasilan PSDKP di tahun 2025 bukan ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh perubahan paradigma dari pengawasan konvensional ke pengawasan yang cerdas (*smart surveillance*), berbasis data, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Beberapa faktor strategis yang mendorong pencapaian Kinerja Ditjen PSDKP tahun 2025, sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pengawasan Berbasis Teknologi yaitu mengintegrasikan pengawasan di laut berupa patroli dengan pengawasan berbasis teknologi (satelit, VMS, radar) dan pemantauan jarak jauh (*remote monitoring*). Hal ini memungkinkan deteksi pelanggaran secara presisi tanpa harus selalu mengerahkan kapal patroli secara terus-menerus.
2. Penerapan Manajemen Risiko (*Risk-Based Surveillance*) yaitu pengawasan dilakukan dengan skala prioritas. Pengawasan memfokuskan pada wilayah atau pelaku usaha yang memiliki profil risiko pelanggaran tinggi, sehingga penggunaan bahan bakar dan personel menjadi jauh lebih efisien.
3. Penguatan Sinergi dan Operasi Bersama lintas lembaga (TNI AL, Polairud, Bakamla) dan pemerintah daerah. Melalui operasi bersama (*joint operations*), biaya operasional dapat ditanggung bersama, sehingga jangkauan pengawasan tetap luas meski anggaran mandiri terbatas.
4. Optimalisasi Peran Masyarakat melalui pembinaan secara aktif kepada Pokmaswas yang sudah terbentuk dan aktif baik secara tatap muka melalui koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.
5. Digitalisasi Layanan dan Pemeriksaan pelaku usaha kini didorong secara kolektif dan daring melalui aplikasi e-SLO, yang memangkas biaya perjalanan dinas petugas lapangan tanpa mengurangi kualitas pengawasan.

Alokasi anggaran Ditjen. PSDKP TA. 2025 sebesar Rp. 1.672.603.377.000,-. Anggaran tersebut didistribusikan pada 6 (enam) unit kerja pada satker pusat, 14 (empat belas) UPT Pengawasan SDKP. Realisasi Anggaran Ditjen. PSDKP Tahun 2025 sebesar Rp.1.610.505.791.642,- (96,29%).



BAB I PENDAHULUAN

Arah kebijakan pemerintahan periode 2025-2029 akan fokus pada pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan merata, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. RPJMN ini menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan potensi strategis nasional untuk memperkuat ketahanan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Hal itu didukung pula oleh arah kebijakan presiden dan wakil presiden 2025-2029 yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai tujuan tersebut, disusunlah 8 misi Asta Cita sebagai agenda prioritas nasional, antara lain:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung Misi Asta Cita ke-2 hingga ke-8, terutama Misi Astacita ke-2, 5, dan 8.

Selain misi Asta Cita, terdapat pula 17 Program Prioritas RPJMN 2025-2029 disusun untuk mewujudkan kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan rakyat, antara lain:

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi

5. Pemberantasan kemiskinan
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba
7. Menjamin tersedianya pelayanan, kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
8. Penguatan pendidikan sains, dan teknologi serta digitalisasi.
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak dan penyandang disabilitas.
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup.
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida, langsung ke petani.
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat pedesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara serta kota-kota inovatif karakteristik-mandiri lainnya.
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah dan, pendirian, dan perawatan rumah ibadah.
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Dalam 17 program prioritas tersebut, KKP berperan dalam program nomor 1 (swasembada pangan), 5 (pemberantasan kemiskinan), 11 (pelestarian lingkungan hidup), dan 15 (hilirisasi berbasis sumber daya alam termasuk sumber daya maritim). Melalui strategi ini, pemerintah berkomitmen untuk memajukan Indonesia menuju negara yang lebih maju, adil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Lebih lanjut, KKP telah melakukan transformasi kebijakan tata kelola pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru dengan menempatkan ekologi sebagai panglima serta menjaga keseimbangan antara aspek sosial ekonomi dan lingkungan. Keseimbangan interaksi kedua aspek tersebut akan berbuah kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Ekonomi biru tidak hanya melihat potensi kelautan sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sangat menekankan kepada vitalnya menjaga kelestarian lingkungan hidup di dalam ekosistem laut secara keseluruhan. Selain mengutamakan menjaga kesehatan laut, kebijakan strategis ini juga membuka peluang investasi, lapangan pekerjaan, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional karena distribusi pertumbuhan ekonomi sehingga dapat

meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah. Adapun detail kebijakan Ekonomi Biru sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1. Kebijakan Ekonomi Biru Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kebijakan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dilakukan pada tahun 2025 merupakan dukungan dalam implementasi dari kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui ekonomi biru.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) sebagai unit Eselon I pada Kementerian Kelautan dan Perikanan diberikan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan guna mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggung jawab.

Ditjen PSDKP memiliki peran strategis dalam memastikan keberhasilan kebijakan ekonomi biru KKP. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan melalui: 1) Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan; 2) Meningkatnya kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan; 3) Meningkatnya efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; 4) Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

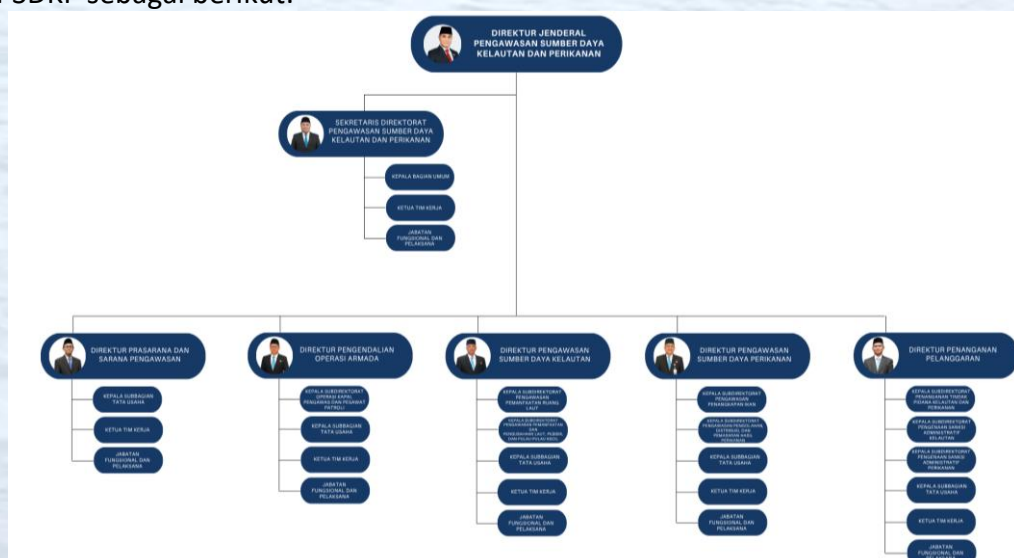
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen. PSDKP menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan,

dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;

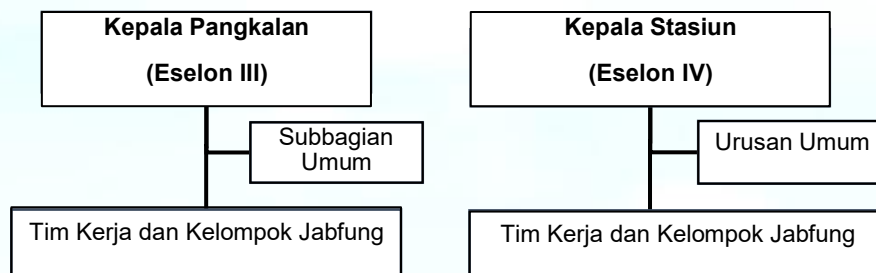
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal PSDKP; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut ditetapkan struktur Organisasi Ditjen PSDKP sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi Ditjen PSDKP

Ditjen PSDKP dalam melaksanakan tugas operasional pengawasan di di daerah dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang saat ini berjumlah 14 (empat belas) yakni 6 (enam) Pangkalan PSDKP: Lampulo, Batam, Jakarta, Benoa, Bitung, Tual, dan 8 (delapan) Stasiun PSDKP: Belawan, Cilacap, Pontianak, Tarakan, Tahuna, Ambon, Kupang dan Biak. Adapun struktur organisasi UPT Ditjen PSDKP sebagai berikut:



Gambar 3. Struktur Organisasi UPT Ditjen PSDKP

B. ISU STRATEGIS PENGAWASAN SDKP

Isu strategis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan antara lain:

1. *Illegal fishing*, praktek *IUU fishing* masih marak terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) baik dalam bentuk pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) maupun penangkapan ikan oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII).
2. Penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL), Penyelundupan BBL dengan mengirim benih bening lobster secara ilegal ke luar negeri. Hal ini merugikan negara dari segi ekonomi dan mengganggu keseimbangan ekosistem laut, mengingat benih tersebut seharusnya dibudidayakan di dalam negeri.
3. Pemanfaatan ruang laut ilegal yang dilakukan tanpa izin atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) maupun tidak sesuai peruntukannya.
4. Pemanfaatan sedimentasi laut ilegal, melibatkan pengambilan atau pemindahan sedimen laut tanpa izin, yang bisa merusak dasar laut, serta mengganggu keseimbangan ekosistem laut.
5. *Destructive fishing*: *Destructive fishing* melibatkan metode penangkapan ikan yang merusak lingkungan, seperti penggunaan bom ikan, racun, atau alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Praktik ini mengancam kelestarian sumber daya ikan dan habitat laut.
6. *Transshipment* ilegal, perbudakan, perdagangan orang: *Transshipment* ilegal mengacu pada pemindahan hasil tangkapan dari satu kapal ke kapal lain di tengah laut tanpa izin yang sah, seringkali terkait dengan perbudakan dan perdagangan orang. Hal ini merupakan pelanggaran serius yang merusak integritas industri perikanan dan melanggar hak asasi manusia.
7. Pemanfaatan jenis ikan dilindungi secara ilegal: Pemanfaatan ikan yang dilindungi secara ilegal mengacu pada penangkapan, perdagangan, dan konsumsi spesies ikan

yang termasuk dalam daftar dilindungi tanpa izin resmi. Hal ini dapat mengancam kelestarian spesies tersebut dan merusak ekosistem perairan.

8. Impor dan distribusi ikan ilegal, kegiatan ini seringkali melibatkan penyelundupan dan dapat merugikan ekonomi lokal serta mengancam kesehatan konsumen karena kurangnya kontrol kualitas.
9. Budidaya ikan ilegal dan mencemari. Kegiatan budidaya ikan ilegal dilakukan tanpa izin dan sering kali mencemari lingkungan sekitar karena tidak mengikuti standar lingkungan yang ditetapkan. Praktik ini dapat merusak habitat alami dan mengganggu keseimbangan ekosistem perairan.
10. Perusakan ekosistem perairan berupa tindakan yang menyebabkan kerusakan habitat alami, seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun. Ini dapat berdampak negatif pada keanekaragaman hayati dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
11. Pencemaran perairan melalui penggunaan bahan berbahaya seperti limbah industri, pertanian, atau rumah tangga masuk ke dalam ekosistem perairan, merusak kualitas air dan kehidupan organisme di dalamnya.
12. Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) secara ilegal melibatkan pengambilan artefak atau barang berharga dari bangkai kapal yang tenggelam tanpa izin. Ini tidak hanya merugikan negara secara ekonomi tetapi juga menghilangkan nilai sejarah dan arkeologi.
13. Penggunaan pakan dan obat ikan. Pakan ikan yang digunakan harus memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, serta tidak mengandung bahan berbahaya atau zat terlarang yang dapat membahayakan kesehatan ikan maupun konsumen. Begitu pula dengan obat ikan, penggunaannya wajib mengikuti dosis dan jenis, sesuai petunjuk resmi agar residunya tidak mencemari hasil panen. Dengan menerapkan pengawasan yang berbasis regulasi, praktik budidaya perikanan dapat berjalan secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan menghasilkan produk yang aman dikonsumsi.
14. Rendahnya literasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab.
15. Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat/pelaku usaha dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
16. Rendahnya peran masyarakat dalam mengakses dan penyebarluasan informasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
17. Tingginya resistensi masyarakat/pelaku usaha terhadap kebijakan tata kelola kelautan dan perikanan.
18. Belum optimalnya peran pokmaswas dalam membantu pengawasan SDKP.

C. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Mengacu Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2. Sistematika laporan kinerja

BAB I PENDAHULUAN	Menguraikan secara ringkas tentang kondisi umum yang mencakup tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, isu aktual pengawasan SDKP, serta struktur organisasi Ditjen. PSDKP
BAB II PERENCANAAN KINERJA	Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Penetapan Kinerja tahun 2025
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2025
BAB IV PENUTUP	Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DITJEN PSDKP

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Melalui Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 86/KEP.DJ-PSDKP/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi Ditjen PSDKP adalah:

“Indonesia bebas pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan demi Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Dengan misi:

1. Meningkatkan pengawasan dan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang partisipatif, efektif, tangguh dan sinergis
2. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel di lingkungan Ditjen PSDKP

2. Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Ditjen. PSDKP maka dirumuskan beberapa Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2025-2029. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan KKP tahun 2025-2029 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, yaitu:

1. Meningkatnya Ketangguhan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk

Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan Serta Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Berdaya Saing

2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas lingkup Ditjen PSDKP

Berdasarkan Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2025-2029 tersebut maka disusunlah Sasaran Program Ditjen. PSDKP yang dirumuskan dari Sasaran Strategis KKP tahun 2025-2029 sebagaimana berikut:

1. Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan dengan indikator sasaran strategis “Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan”
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas dengan indikator sasaran strategis “Indeks Reformasi Birokrasi KKP”

B. PERJANJIAN KINERJA

Pada tahun 2025 Ditjen PSDKP telah menetapkan 5 (lima) sasaran program dan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen PSDKP tanggal 17 Januari 2025 sebagaimana disajikan berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2025 (awal)

Sasaran Program 1 : Meningkatnya kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan			
Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahun 2025
1	Indeks kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan	Indeks	80
2	Persentase keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	%	90
3	Tingkat keterlibatan masyarakat (<i>Engagement Rate</i>) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	%	>1
Sasaran Program 2 : Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
4	Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Indeks	82
Sasaran Program 3 : Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
5	Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Indeks	92
6	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP	Indeks	80
Sasaran Program 4 : Meningkatnya efektifitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
7	Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan	Indeks	80
Sasaran Program 5 : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel di lingkungan Ditjen PSDKP			
Indikator Kinerja		Satuan	Target

8	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP	Indeks	80
---	---	--------	----

Adapun pada tanggal 2 Desember 2025 dilakukan perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen PSDKP sebagaimana disajikan berikut:

Tabel 4. Revisi Perjanjian Kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2025

Sasaran Program 1 : Meningkatnya kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan			
Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahun 2025
1	Indeks kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan	Indeks	80
2	Nilai keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	%	90
3	Tingkat keterlibatan masyarakat (<i>Engagement Rate</i>) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	%	>1
Sasaran Program 2 : Meningkatnya efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
4	Indeks pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks	75
Sasaran Program 3 : Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
5	Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Indeks	92
6	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Indeks	80
Sasaran Program 4 : Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
7	Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan	Indeks	80
Sasaran Program 5 : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel di lingkungan Ditjen PSDKP			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
8	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP	Indeks	80

C. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama implementasi pengelolaan kinerja dalam rangka menjamin akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi data kinerja yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja Ditjen. PSDKP dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual Indikator Kinerja.

Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung secara berkala (triwulanan) dan tahunan dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja tersebut, dimasukan kedalam Sistem Aplikasi Kinerjaku berbasis informasi teknologi melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>, dan dituangkan dalam Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PENGAWASAN SDKP

Ditjen. PSDKP menetapkan 5 (lima) Sasaran Program dan 8 (delapan) Indikator Kinerja yang menjadi target Ditjen. PSDKP di tahun 2025. Berdasarkan verifikasi dan validasi terhadap 8 (delapan) IKU tersebut, Nilai Kinerja Organisasi Ditjen PSDKP pada Tahun 2025 mencapai **111,69%**, dengan kategori “**Istimewa**”. Capaian kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Ditjen.PSDKP Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	Persentase
1	Indeks kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan (indeks)	80	88,44	110,55%
2	Nilai keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	90	95,5	106,11%
3	Tingkat keterlibatan masyarakat (<i>Engagement Rate</i>) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	>1	1,08	108%
4	Indeks pengawasan sumber daya kelautan perikanan (indeks)	75	96,92	120%
5	Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (indeks)	92	95,73	104,05%
6	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (indeks)	80	88,68	110,85%
7	Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan (indeks)	80	92,33	115,41%
8	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	86	91,76	106,70%

B. EVALUASI DAN ANALISIS

SASARAN PROGRAM 1

MENINGKATNYA KESADARTAHUAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN

IKU 1. INDEKS KESADARTAHUAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tabel 6. Target dan realisasi IKU Indeks kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan

Realisasi Tahun 2021-2024				Tahun 2025			Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	%	Target 2029	% Capaian terhadap target akhir Renstra
-	-	-	-	80	88,44	110,55	84	105,29

Indeks kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan digunakan untuk mengukur pemahaman dan tingkat kesadartahuan masyarakat/pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundang-undangan sektor kelautan dan perikanan. Kesadartahuan masyarakat/pelaku usaha diukur berdasarkan hasil kuesioner yang dilakukan pada kegiatan sosialisasi/penyadartahuan masyarakat/pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Formula

$$x_k = \sum_{k=0}^n \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Xk = Indeks kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan

Xn = nilai kesadartahuan responden

n = jumlah responden

Realisasi capaian indikator kinerja Indeks kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan tahun 2025 yaitu sebesar 88,44 atau tercapai sebesar 110,55% dari target tahun 2025 sebesar 80. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat kesadartahuan masyarakat. Namun demikian, capaian tersebut tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya karena indikator ini merupakan indikator baru. Adapun bila dibandingkan dengan target akhir renstra Ditjen PSDKP tahun 2025-2029 sebesar 84 maka diperoleh capaian sebesar 105,29%.

Capaian indikator kinerja ini diperoleh dari kegiatan penyadartahuan pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diikuti oleh 367 peserta dengan rincian sebagai berikut:

- 86 pelaku usaha pembudidayaan PMA;
- 35 peserta internal KKP dari Ditjen Perikanan Budi Daya dan BPPMHKP;
- 234 pengawas perikanan dan pegawai lingkup Ditjen PSDKP;
- 1 peserta dari Asosiasi Budidaya Mutiara Indonesia; dan

e. 11 peserta dari Pemda Maluku dan Gresik.

Pada kegiatan tersebut, disampaikan empat materi sebagai berikut:

- Kewajiban Perizinan Berusaha Usaha dalam Pembudidayaan Ikan
- Penggunaan Obat Ikan dalam Pembudidayaan Ikan
- Sertifikasi Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)
- Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Kegiatan Pembudidayaan Ikan

Selain itu juga telah dilakukan kegiatan penyadartahuan pelaku usaha pulau-pulau kecil yang diikuti oleh 20 peserta. Dalam kegiatan tersebut disampaikan terkait peraturan perundangan khususnya dalam pengelolaan ruang laut, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), dan perizinan berusaha.



Gambar 4. Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 di Tegal, Jawa Tengah

Tercapainya kinerja kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan ditentukan oleh peran aktif Ditjen PSDKP dalam melakukan sosialisasi/desiminasi/penyadartahuan terkait peraturan perundang-undangan kepada masyarakat secara *hybrid*, yaitu secara tatap muka dan daring melalui aplikasi *zoom meeting*. Menindaklanjuti hal tersebut, maka penyebaran informasi secara berkala kepada masyarakat dilakukan secara intensif, sehingga masyarakat paham akan peraturan perundang-undangan sektor kelautan dan perikanan. Namun demikian, untuk menyikapi kebijakan efisiensi anggaran, pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara *hybrid*, yaitu secara tatap muka dan daring melalui aplikasi *zoom meeting*.

IKU 2. NILAI KEAKTIFAN POKMASWAS DALAM MENDUKUNG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tabel 7. Target dan capaian IKU Nilai keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Realisasi Tahun 2021-2024				Tahun 2025			Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	%	Target 2029	% Capaian thd target akhir

								Renstra
-	-	-	-	90	95,5	106,11	94	101,60

Kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) adalah komponen masyarakat yang membentuk kelompok yang anggotanya dapat berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, petani ikan, dan/atau masyarakat maritim lainnya, yang ikut serta membantu melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yang ditunjuk, dikukuhkan dan ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keaktifan Pokmaswas yang dibina sebagai wujud efektifitas pelaksanaan sistem pengawasan SDKP berbasis masyarakat dalam mendukung implementasi tata kelola kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru.

Formula

$$x_p = \sum \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Keterangan:

Xp = Rata-rata nilai keaktifan seluruh Pokmaswas

Xn= Nilai keaktifan suatu kelompok Pokmaswas

n = Jumlah Pokmaswas yang dibina

Kriteria keaktifan:

1. Melaksanakan Pemantauan SDKP (30)
2. Partisipasi kegiatan pembinaan/sosialisasi (20)
3. Melakukan koordinasi dengan Instansi Terkait (20)
4. Melakukan rapat rutin kelompok (30)

Realisasi capaian indikator nilai keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2025 adalah sebesar 95,5 atau sebesar 106,11% dari target tahun 2025 sebesar 90. Hal ini mencerminkan bahwa Pokmaswas pada tahun 2025 termasuk aktif. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024 karena indikator ini merupakan indikator baru. Adapun, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Ditjen PSDKP tahun 2025-2029 sebesar 94 maka diperoleh capaian sebesar 101,60%.

Pada Tahun 2025, kinerja pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) menunjukkan tingkat partisipasi yang cukup signifikan, tercermin dari sebanyak 990 Pokmaswas yang tercatat aktif dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan

perikanan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 89 Pokmaswas memenuhi kriteria penilaian yang ditetapkan.

Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung indikator ini adalah kegiatan Workshop Strategi dan Aksi Pokmaswas dalam Mendukung Pengawasan Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan di WPP 715 tanggal 12 – 14 Agustus 2025 di Manado Sulawesi Utara, pembinaan Pokmaswas dengan Dinas KP Provinsi Banten, monitoring evaluasi pendampingan kegiatan penyusunan pelaporan pembinaan Pokmaswas pada tanggal 25 Juli 2025 di Banten, dan pembinaan Pokmaswas pada tanggal 10-11 September 2025 di Provinsi Sumatera Selatan serta monitoring rutin kegiatan Pokmaswas.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan yaitu adanya blokir anggaran dan keterjangkauan internet yang masih terbatas di lokasi Pokmaswas pada beberapa daerah sehingga menyulitkan dalam berkoordinasi.

Namun demikian, terdapat faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan capaian indikator, antara lain:

- Optimalisasi sistem pelaporan melalui kanal daring (grup komunikasi dan *dashboard* laporan mingguan).
- Pembinaan Pokmaswas secara daring menggunakan aplikasi zoom meeting setiap hari Rabu dan Jum'at (2 hari dalam seminggu).
- Optimalisasi penggunaan WA *gateway* PSDKP sebagai media pelaporan pelanggaran; dan
- Pelaporan kegiatan Pokmaswas bulanan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

Lebih lanjut, pembinaan Pokmaswas dilakukan secara daring melalui *zoom meeting* untuk efektifitas koordinasi antara Pusat, DKP Provinsi, dan Pokmaswas.



Gambar 5. Kegiatan Workshop Strategi dan Aksi Pokmaswas dalam Mendukung Pengawasan Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan di Manado dan Pembinaan Pokmaswas di Banten.

IKU 3. TINGKAT KETERLIBATAN MASYARAKAT (*ENGAGEMENT RATE*) DALAM MEDIA SOSIAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tabel 8. Target dan capaian IKU Tingkat keterlibatan masyarakat (*Engagement Rate*) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Realisasi Tahun 2021-2024				Tahun 2025			Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	%	Target 2029	% Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	-	>1	1,08	108	>1	108

Tingkat keterlibatan Masyarakat (*Engagement Rate*) adalah indikator untuk mengukur interaksi audiens dengan konten digital pada media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Pengukuran dilakukan dengan cara menghitung jumlah interaksi/*engagement* (*like*, komentar, *share*, *subscribe*, dll) pada konten-konten media sosial Ditjen PSDKP. Media sosial yang digunakan oleh Ditjen PSDKP yaitu: Youtube, X, Instagram, Tiktok, dan Facebook. Adapun formula penghitungan yaitu:

Formula

$$ERPR_{psdkp} = (ERPR1 + ERPR2 + ERPR3 + \dots + ERPRn) / n$$

n = jumlah media sosial yang digunakan

Perhitungan masing-masing sosial media:

$$ERPR = [(x / (y \times z)) \times 100]$$

Keterangan:

x = jumlah interaksi/*engagement*

y = jumlah pengikut (*followers*)

z = jumlah konten

Penghitungan tahun 2025:

$$ERPR_{psdkp} = (ERPR_{instagram} + ERPR_x + ERPR_{facebook} + ERPR_{tiktok} + ERPR_{youtube}) / 5$$

$$= (3,74 + 0,13 + 0,66 + 0,70 + 0,15) / 5 = 1,08$$

$$ERPR_{instagram} = [(x / (y \times z)) \times 100] = [(302.342 / (25.217 \times 321)) \times 100] = 3,74$$

$$ERPR_x = [(x / (y \times z)) \times 100] = [(3.437 / (7.768 \times 332)) \times 100] = 0,13$$

$$ERPR_{facebook} = [(x / (y \times z)) \times 100] = [(92.679 / (38.433 \times 367)) \times 100] = 0,66$$

$$ERPR_{TikTok} = [(x / (y \times z)) \times 100] = [(52.783 / (29.794 \times 252)) \times 100] = 0,70$$

$$ERPR_{youtube} = [(x / (y \times z)) \times 100] = [(6.643 / (29.571 \times 147)) \times 100] = 0,15$$

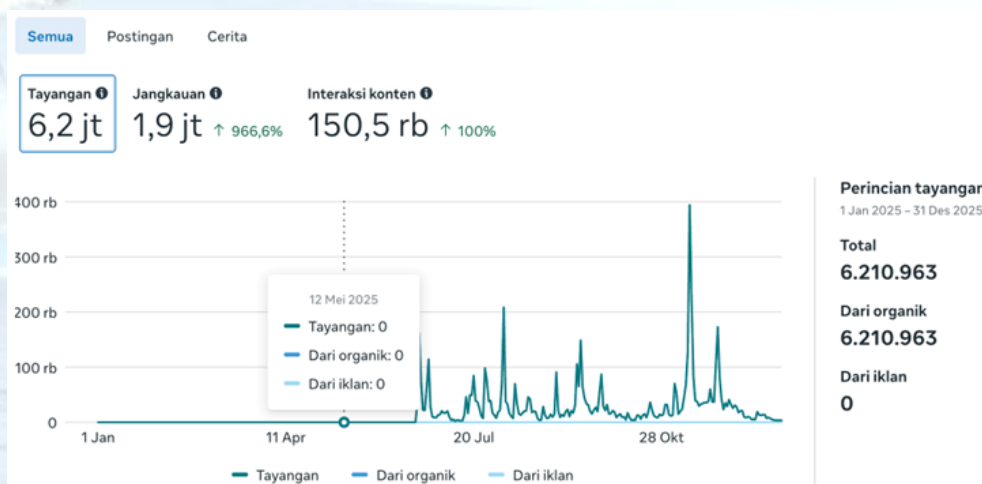
Realisasi capaian indikator kinerja tingkat keterlibatan masyarakat (*Engagement Rate*) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2025 sebesar 1,08 atau tercapai sebesar 108% dari target tahun 2025 (>1). Capaian tersebut tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya karena indikator ini merupakan indikator baru.

Disisi lain, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Ditjen PSDKP tahun 2025-2029 diperoleh capaian sebesar 108%.

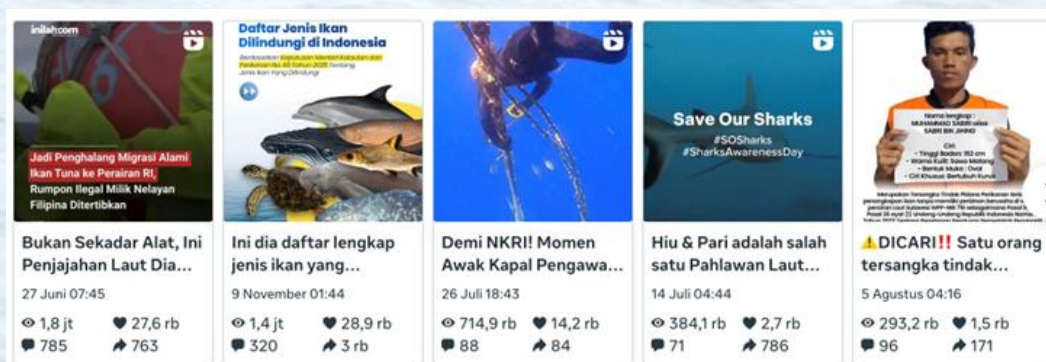
Sepanjang tahun 2025, media sosial Direktorat Jenderal PSDKP mempublikasikan sebanyak 367 konten, yang terdiri dari konten infografis (poster/carousel) maupun video pendek (reels/short). Konten tersebut diunggah melalui platform media sosial Ditjen PSDKP yang terdiri dari Instagram, Facebook, TikTok, X (Twitter), serta YouTube. Berikut merupakan capaian kinerja dari masing-masing platform media sosial.

Instagram

Di akun media sosial Instagram, sepanjang tahun 2025, konten-konten Ditjen PSDKP dilihat sebanyak 6,2 juta kali, mendapat interaksi (*likes, comment, share* dan *save*) sebesar 150,5 ribu dan diikuti sebanyak 4.137 *followers* baru. Konten terbaik adalah konten mengenai Infografis Daftar Jenis Ikan Dilindungi di Indonesia (1,4 juta *views*).



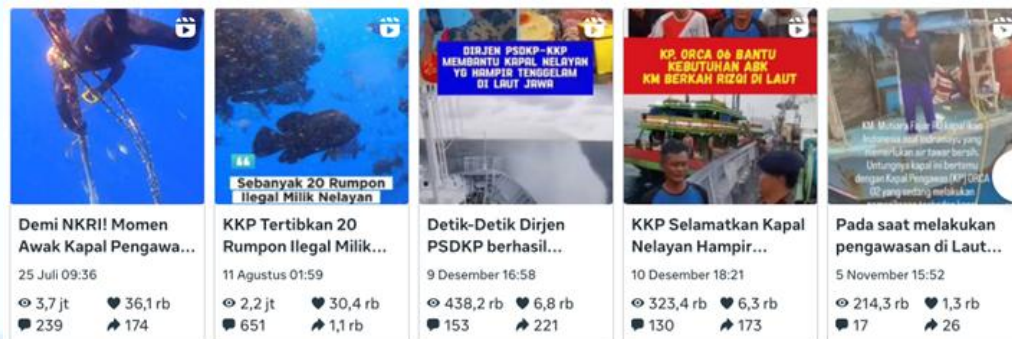
Gambar 6. Overview media sosial Instagram Ditjen PSDKP.



Gambar 7. Contoh konten media sosial Instagram Ditjen PSDKP yang memiliki *engagement* tinggi tahun 2025.

Facebook

Sementara untuk Facebook, sepanjang tahun 2025, konten-konten Ditjen PSKDP dilihat sebanyak 12,2 juta kali, mendapat interaksi (*likes, comment, share* dan *save*) sebesar 214,2 ribu dan diikuti sebanyak 22.685 *followers* baru. Konten terbaik adalah konten mengenai Video Momen Awak Kapal Pengawas Potong Rumpon Ilegal (3,7 juta *views*).



Gambar 8. Contoh konten media sosial Facebook Ditjen PSDKP yang memiliki *engagement* tinggi tahun 2025.

X (Twitter)

Pada media sosial X (Twitter), sepanjang tahun 2025, konten-konten Ditjen PSKDP dilihat sebanyak 50,4 ribu kali, mendapat interaksi (*likes, comment, share* dan *save*) sebesar 3.437 akan tetapi tidak bertambah *followers* baru. Konten terbaik adalah konten mengenai Siaran Pers KKP Gagal Aksi Illegal Fishing oleh Kapal Ikan Asing Filipina Berukuran Jumbo (24,3 ribu *views*).

TikTok

Selain itu, untuk media sosial TikTok, sepanjang tahun 2025, konten-konten Ditjen PSKDP dilihat sebanyak 4,3 juta kali, mendapat interaksi (*likes, comment, share* dan *save*) sebesar 84,2 ribu dan diikuti sebanyak 4,100 *followers* baru. Konten terbaik adalah konten mengenai Video KKP Tertibkan 20 Rumpon Ilegal (594 ribu *views*).

YouTube

Sementara untuk YouTube, sepanjang tahun 2025, konten-konten Ditjen PSKDP dilihat sebanyak 1,9 juta kali, ditonton sebanyak 65,9 ribu jam dan diikuti sebanyak 4,600 *followers* baru. Konten terbaik adalah konten mengenai Video Kapal Ikan Asing Asal Vietnam Lagi-Lagi Tertangkap Curi Ikan di Selat Malaka (145 ribu *views*).

Berdasarkan analisis performa di atas, keberhasilan tercapainya indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Aktivitas produksi konten tinggi: Secara kuantitas, tim kerja Humas sangat aktif dengan total 367 konten yang dipublikasikan sepanjang tahun, ini mencerminkan konsistensi publikasi setidaknya satu konten setiap hari di lintas *platform* (Instagram, Facebook, TikTok, X, dan YouTube).
2. Facebook sebagai kanal jangkauan terluas: Facebook memberikan performa jangkauan (tayangan) paling signifikan bagi Ditjen PSDKP, yakni sebesar 12,2 juta tayangan. Hal ini didorong konten video aksi lapangan, seperti momen pemotongan rumpon ilegal yang mendapatkan 3,7 juta *views*. Dan sebagian besar interaksi dengan audiens nelayan terjadi di *platform* Facebook.
3. Efektivitas visual infografis di Instagram: Di *platform* Instagram, konten informatif berupa infografis Daftar Jenis Ikan Dilindungi menjadi konten terbaik dengan raihan 1,4 juta *views*. Ini menunjukkan audiens Instagram merespons positif konten edukasi yang dikemas secara visual.
4. Tantangan pertumbuhan followers & platform X: Meskipun tayangan mencapai jutaan, peringkat jumlah *followers* Ditjen PSDKP masih berada di papan tengah-bawah jika dibandingkan Unit Eselon I Kementerian lain (misalnya peringkat 66 di Instagram dan 14 di Facebook). Sementara platform X (Twitter) menunjukkan performa terendah dengan nol pertumbuhan *followers* baru sepanjang tahun.

Kendala yang dihadapi tim kerja Humas dalam pengelolaan dan produksi media sosial Ditjen PSDKP adalah sebagai berikut.

1. Jumlah platform media sosial yang banyak, menjadikan admin tidak bisa fokus mengembangkan seluruh platform secara merata.
2. Konten pada masing-masing platform masih cenderung seragam, belum dibedakan, karena admin dan editor konten juga memiliki penugasan lain, tidak hanya berfokus pada pengelolaan media sosial.
3. Saat ini, admin media sosial pemerintahan pada umumnya memiliki perangkat handphone khusus yang digunakan untuk mengambil gambar dan mengolah gambar sekaligus sehingga pengolahan bahan publikasi lebih efisien dan cepat tayang. Sementara tim Humas Ditjen PSDKP masih menggunakan kamera DSLR sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk memindah gambar ke komputer/laptop dan mengedit melalui komputer/laptop, sehingga kurang fleksibel, efektif, serta efisien.

SASARAN PROGRAM 2

MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

IKU 4. INDEKS PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN PERIKANAN

Tabel 9. Target dan capaian IKU Indeks pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Realisasi Tahun 2021-2024				Tahun 2025			Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	%	Target 2029	% Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	-	75	96,92	120	79	120

Indeks pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan digunakan untuk kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terhadap pelaku usaha sektor kelautan dan sektor perikanan. Indeks ini merupakan gabungan dari beberapa komponen indikator (*composite index*) yang diukur berdasarkan bobot tertentu. *Composite index* meliputi cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI, operasi intelijen kelautan dan perikanan, dan nilai pengawasan SDKP.

Formula

$$x = (x1+x2+x3+x4+x5)/5$$

Keterangan :

X = Indeks Pengawasan SDKP (indeks)

X1 = cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI

X2 = Nilai kualitas operasi intelijen kelautan

X3 = Nilai kualitas operasi intelijen perikanan

X4 = Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan

X5 = Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan

Penghitungan

$$X1 = 100$$

$$X2 = 99,86$$

$$X3 = 100$$

$$X4 = 98,82$$

$$X5 = 85,91$$

$$X = ((x1+x2+x3+x4+x5)/5 = (100+99,86+100+98,82+85,91)/5 = \mathbf{96,92}$$

Realisasi capaian Indeks pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2025 sebesar 96,92 atau tercapai sebesar 120% dari target tahun 2025 yang sebesar 75. Capaian tersebut tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024 karena indikator ini merupakan indikator baru. Lebih lanjut, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Ditjen PSDKP tahun 2025-2029 sebesar 79, maka diperoleh capaian sebesar 120%.

Adapun capaian indikator ini diperoleh dari kegiatan utama berupa:

- Pemantauan SDKP di WPP NRI oleh Pusat Pengendalian (Pusdal) Ditjen PSDKP
- Operasi intelijen kelautan dan perikanan oleh UPT PSDKP
- Pengawasan sumber daya kelautan perikanan oleh UPT PSDKP dan Direktorat pusat

Tercapainya realisasi indikator ini tidak lepas dari beberapa kegiatan pendukung seperti pemantauan VMS di seluruh WPPNRI, pengawasan rutin dan insidental terhadap pelaku usaha kelautan dan perikanan, pengawasan di pelabuhan terhadap kedatangan dan keberangkatan kapal, monitoring secara berkala baik secara luring maupun daring, koordinasi dengan UPT Ditjen PSDKP serta pelaku usaha, dan supervisi pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan kepada UPT.

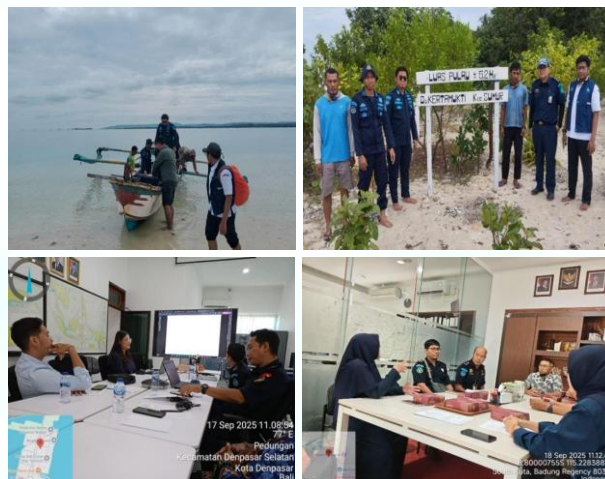


Gambar 9. Contoh pemantauan SDKP di WPPNRI

Selain itu, beberapa hal lain yang juga mendukung keberhasilan indikator ini seperti kedisiplinan pengawas dalam melaporkan hasil pengawasan, dan kedisiplinan tim verifikator dalam memverifikasi hasil pengawasan pengawas kelautan dan perikanan UPT, sehingga setiap kegiatan usaha yang mendapatkan rekomendasi pembinaan dan perbaikan serta sanksi dapat ditindaklanjuti sedini/sesegera mungkin.

Namun demikian, adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, membuat kegiatan pemeriksaan dalam pengawasan mengalami perubahan strategi. Adapun strategi yang diterapkan Ditjen PSDKP, yaitu:

1. Memprioritaskan pemeriksaan pelaku usaha secara kolektif dan daring;
2. Penguatan penggunaan data intelijen baik melalui data informasi dari sumber terbuka; dan
3. Mendorong lebih jauh peran Pokmaswas sebagai garda terdepan pengawasan.



Gambar 10. Pengawasan pulau-pulau kecil di Kabupaten Pandeglang, Banten, serta pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut di Kabupaten Badung, Bali.

SASARAN PROGRAM 3

MENINGKATNYA KETANGGUHAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

IKU 5. INDEKS OPERASI ARMADA PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tabel 10. Target dan capaian IKU Indeks operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Realisasi Tahun 2021-2024					Tahun 2025		Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	%	Target 2029	% Capaian thd target akhir Renstra
-	-	97,21	97,64	92	95,73	104,05	96	99,72

Indeks operasi armada PSDKP digunakan untuk mengukur efektifitas pelaksanaan operasi armada pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah laut yang terdiri dari operasi kapal pengawas, operasi pesawat patroli (*air surveillance*), dan operasi *speedboat* pengawas.

Indeks kinerja operasi armada merupakan gabungan dari beberapa komponen indikator (*composite index*) yang diukur berdasarkan bobot tertentu terdiri dari indeks operasi kapal pengawas, indeks operasi speedboat pengawas dan indeks operasi Pesawat Patroli Udara.

Formula

$$X = (X1 + X2 + X3) / 3$$

Keterangan:

X = indeks Operasi Armada

X1 = indeks Kapal Pengawas

X2 = indeks SpeedBoat

X3 = indeks Pesawat Patroli

Penghitungan

X1 = indeks kinerja kapal pengawas = 96,42

X2 = indeks kinerja speedboat pengawas = 94,02

X3 = indeks kinerja pesawat patroli = 96,76

X = indeks operasi armada = (96,42+94,02+96,76) / 3 = 95,73

Pada tahun 2025, Indeks operasi armada PSDKP memiliki realisasi sebesar 95,73 atau tercapai sebesar 104,05 % dari target tahun 2025 sebesar 92. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (97,64), indeks ini mengalami penurunan sebesar 1,91 poin. Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan target Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029 sebesar 96, maka tercapai sebesar 99,72%.

Capaian Indeks kinerja operasi armada Pengawasan SDKP diperoleh dari capaian 3 (tiga) komponen armada pengawasan yang dimiliki oleh Ditjen PSDKP yaitu: a) Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan; b) Speedboat Pengawas; dan c) Pesawat Patroli. Masing-masing capaian dari ketiga armada pengawasan tersebut, sebagai berikut:

a. Indeks Kinerja Kapal Pengawas

Indeks kinerja kapal pengawas pada tahun 2025 terealisasi sebesar 96,42. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja kapal pengawas termasuk sangat baik. Indeks kinerja kapal pengawas mencerminkan kinerja 34 kapal pengawas Ditjen PSDKP dalam melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Adapun beberapa komponen yang menjadi pengukuran kinerja kapal pengawas seperti: 1) pemeriksaan kapal perikanan; 2) pemeriksaan kelautan; 3) persentase cakupan wilayah pengawasan; 4) *intercept* target operasi; 5) dukungan kegiatan SAR; 6) penyitaan alat tangkap terlarang; 7) pemutusan rumpon ilegal; 8) dukungan operasi bersama.

Jika ditelisik lebih lanjut, hasil kinerja kapal pengawas tampak sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 7506 Kapal Perikanan

2. Pemeriksaan kelautan sebanyak 522 objek kelautan
3. Cakupan wilayah pengawasan adalah 100%
4. *Intercept* target operasi dilakukan sebanyak 350 tindakan
5. Dukungan kegiatan SAR dilakukan sebanyak 8 kali
6. Penyitaan alat tangkap terlarang sebanyak 13 alat tangkap
7. Pemutusan rumpon ilegal 104 rumpon
8. Dukungan operasi bersama sebanyak 3 operasi

b. Indeks Kinerja Speedboat Pengawas

Indeks kinerja *speedboat* pengawas pada tahun 2025 terealisasi sebesar 94,02. Indeks ini mencerminkan kinerja 85 speedboat pengawas Ditjen PSDKP dalam melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Adapun beberapa komponen yang menjadi pengukuran kinerja kapal pengawas seperti: 1) pemeriksaan kapal perikanan; 2) pemeriksaan kelautan; 3) persentase cakupan wilayah pengawasan; 4) dan tindak lanjut target operasi.

Hasil kinerja speedboat pengawas pada tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 2.310 kapal perikanan
2. Pemeriksaan kelautan sebanyak 357 objek kelautan
3. Cakupan wilayah pengawasan adalah 100%
4. Tindak lanjut target operasi sebanyak 19 kali operasi

c. Indeks Kinerja Pesawat Patroli

Indeks kinerja pesawat patroli mencerminkan kinerja pesawat patroli dalam melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Indeks kinerja operasi pesawat patroli ini dibangun dari komponen jumlah kapal perikanan yang dipantau, persentase *coverage area* pengawasan, persentase capaian hari operasi, persentase jumlah tindak lanjut atas target operasi yang diberikan, persentase jumlah kapal yang divalidasi, persentase operasi di WPPNRI yang rawan dan IUUF yang tinggi KIA, jumlah kegiatan pesawat patroli terhadap pemantauan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan kawasan konservasi, dukungan kegiatan pesawat patroli terhadap patroli operasi bersama, dan jumlah dukungan kegiatan lainnya (misi SAR, kemanusiaan).

Adapun indeks kinerja operasi pesawat patroli terealisasi sebesar 96,76. Hal ini mencerminkan bahwa kinerja pesawat patroli pengawas termasuk sangat tinggi.

Tabel 11. Penghitungan capaian Indeks Kinerja Pesawat Patroli tahun 2025

No	Komponen	Target	Realisasi	Nilai
1	Jumlah kapal perikanan yang dipantau (20%)	835	1354	20,00
2	Persentase coverage area pengawasan (20%)	57,52%	58,87%	20,00
3	Persentase Capaian Hari Operasi (20%)	140	167	20,00
4	Persentase Jumlah Tindak Lanjut Atas Target Operasi yang Diberikan (15%)	29	29	15
5	Persentase Jumlah Kapal yang Divalidasi (5%)	42	38	4,52
6	Persentase operasi di WPPNRI yang rawan dan IUUF yang tinggi KIA (5%)	28	18	3,2
7	Jumlah kegiatan pesawat patroli terhadap pemantauan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan kawasan konservasi (5%)	56	45	4,02
8	Dukungan pesawat patroli terhadap patroli operasi bersama, terkoordinasi, dan interdiksi (5%)	1	1	5
9	Jumlah dukungan kegiatan lainnya (Misi SAR, Kemanusiaan) (5%)	24	24	5
Total Nilai				96,76

Beberapa hal yang menunjang keberhasilan indikator ini yaitu:

- Strategi pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien;
- Evaluasi pasca-operasi secara berkala untuk menilai efektivitas operasi, terutama dalam capaian riksa dan capaian kinerja lainnya;
- Adanya sinergi antara pesawat patroli dan kapal pengawas, khususnya di wilayah rawan *IUU Fishing*, yang kemudian hasil pemantauan tersebut menjadi dasar bagi kapal pengawas untuk melaksanakan tindakan *intercept* secara terarah dan efektif.



Gambar 11. Operasi Pesawat Patroli

IKU 6. INDEKS KESIAPAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN SDKP

Tabel 12. Target dan capaian IKU Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP

Realisasi Tahun 2021-2024				Tahun 2025			Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	%	Target 2029	% Capaian thd target akhir Renstra
-	-	96,05	96,46	80	88,68	110,85	84	105,57

Realisasi indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP pada tahun 2025 sebesar 88,68 atau tercapai 110,85% dari target tahun 2025 sebesar 80. Hal tersebut mencerminkan bahwa kesiapan sarana dan prasarana dalam kondisi baik. Namun, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dan 2024, maka terjadi penurunan. Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan target renstra Ditjen PSDKP tahun 2025-2029 sebesar 84, maka sudah tercapai 105,57%.

Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP adalah indeks yang mengukur tingkat kesiapan aset Ditjen PSDKP berupa : (i) kapal pengawas kelautan dan perikanan (sarana), (ii) bangunan utama Pengawasan SDKP di UPT Ditjen PSDKP (prasarana) yang menggambarkan ketangguhan Pengawasan PSDKP dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan SDKP.

Formula

$$X = (x_a + x_b)/2$$

Keterangan:

x : indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP

x_a : indeks kesiapan sarana pengawasan SDKP

x_b : indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP

Kriteria indeks :

< 70,00 : Kurang

71,00 – 80,00 : Cukup

81,00 – 90,00 : Baik

91,00 – 100 : Sangat Baik

Penghitungan

$$X_a = 95,78$$

$$X_b = 81,58$$

$$X = (95,78 + 81,58)/2 = 88,68$$

Kesiapan sarana pengawasan SDKP adalah kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Penilaian dilakukan terhadap kesiapan sarana pengawasan berupa laporan kondisi teknis (lapkonis) terhadap peralatan navigasi, peralatan komunikasi, perlengkapan keselamatan dan pemadam kebakaran, konstruksi kapal, perlengkapan tambat labuh, mesin utama, dan sistem propulsi, mesin bantu dan sistem perpompaan.

Kriteria kesiapan terbagi menjadi dua, nilai > 75% dinyatakan siap dan nilai <75 dinyatakan tidak siap. Penilaian terhadap kesiapan sarana pengawasan tahun 2024 terhadap 34 unit Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan dengan nilai rata-rata kesiapan sebesar 95,78. Adapun rekapitulasi indeks kesiapan sarana pengawasan tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 13. Penghitungan indeks kesiapan sarana pengawasan SDKP tahun 2025

No	Nama KP	Penempatan	Aspek Penilaian										Nilai
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Orca 01	Dit POA	3.33	3.33	6.42	8.84	2.17	4.50	51.75	4.50	4.37	-	89.20
2	Orca 02	Dit POA	3.27	3.27	6.29	8.84	2.17	4.50	51.65	4.45	4.46	-	88.90
3	Orca 03	Dit POA	3.28	3.28	6.52	8.69	2.16	4.50	51.75	4.45	4.36	-	88.99
4	Orca 04	Dit POA	3.26	3.26	6.70	8.69	2.21	4.45	51.70	4.50	4.44	-	89.21
5	Orca 05	Dit POA	3.36	3.36	6.51	8.99	2.21	4.42	51.75	4.50	4.50	-	89.59
6	Orca 06	Dit POA	3.38	3.38	6.50	9.00	2.23	4.36	51.68	4.50	4.50	-	89.52
7	Barakuda 01	Dit POA	3.38	3.38	6.75	9.00	2.21	4.50	51.75	4.50	4.50	-	89.96
8	Barakuda 02	Dit POA	3.38	3.38	6.69	8.97	2.23	4.50	50.92	4.50	4.46	-	89.02
9	Paus 01	Dit POA	4.00	2.50	4.80	10.00	2.10	2.50	56.70	5.00	5.00	3.00	95
10	Akar Bahar	Dit POA	4.00	2.50	5.00	10.00	2.50	2.50	60.00	5.00	5.00	2.50	99
11	Hiu 03	Batam	4.00	2.50	5.00	10.00	2.50	2.50	60.00	5.00	5.00	2.50	99
12	Hiu 17	Batam	5.00	2.50	5.00	10.00	2.50	2.50	60.00	5.00	5.00	2.50	100
13	Hiu 13	Ambon	4.00	2.50	5.00	9.58	2.50	2.50	60.00	5.00	5.00	2.50	98.58
14	Hiu 06	Jakarta	4.00	4.17	5.00	10.00	2.50	2.50	60.00	5.00	4.44	-	98
15	Hiu 10	Jakarta	5.00	2.50	5.00	10.00	2.10	2.50	60.00	5.00	5.00	2.50	99
16	Hiu 05	Bitung	24.00	5.00	17.00	20.00	5.00	3.00	4.00	5.00	4.00	3.00	99
17	Hiu 02	Bitung	4.00	2.50	5.00	10.00	1.80	2.50	60.00	5.00	3.88	2.50	98
18	Hiu Macan Tutul 01	Bitung	24.00	5.00	17.00	20.00	5.00	3.00	4.00	5.00	4.00	3.00	99
19	Hiu 09	Benoa	4.00	2.50	5.00	10.00	1.80	2.50	60.00	5.00	3.88	2.50	98
20	Hiu Macan Tutul 02	Benoa	4.80	2.50	4.60	10.00	2.50	2.00	60.00	5.00	4.60	2.50	98
21	Hiu 12	Lampulo	4.80	4.20	3.10	10.00	1.80	2.50	60.00	5.00	5.00	-	96
22	Hiu Macan 05	Lampulo	4.80	5.00	4.50	10.00	2.50	2.50	60.00	5.00	4.10	-	98
23	Hiu 14	Tual	4.00	2.10	5.00	10.00	2.50	2.50	56.67	5.00	5.00	2.50	95.27
24	Hiu Macan 06	Tual	4.00	3.00	4.76	10.00	2.50	2.50	60.00	5.00	5.00	3.00	99.76
25	Hiu 01	Belawan	5.00	2.10	5.00	10.00	2.10	2.50	56.67	5.00	4.44	2.50	95.31
26	Hiu 08	Belawan	5.00	5.00	4.05	9.60	1.80	2.50	60.00	5.00	4.40	2.50	99.85
27	Hiu 16	Belawan	5.00	2.50	5.00	10.00	2.50	2.50	60.00	5.00	5.00	2.50	99.81
28	Hiu 4	Cilacap	3.00	2.10	4.00	9.20	1.80	2.50	60.00	4.00	3.90	2.50	93
29	Hiu 07	Tarakan	4.00	2.19	5.00	10.00	2.10	2.50	60.00	5.00	4.44	2.50	98
30	Hiu 11	Pontianak	5.00	1.70	5.00	9.58	2.10	2.50	60.00	5.00	4.44	1.87	97
31	Hiu Macan 01	Pontianak	4.00	1.90	5.00	10.00	2.10	2.50	60.00	5.00	5.00	2.50	98
32	Hiu Macan 03	Kupang	4.00	5.00	3.80	9.61	2.50	1.87	60.00	5.00	4.09	2.50	96
33	Hiu Macan 04	Biak	5.00	2.50	5.00	10.00	2.50	2.50	60.00	5.00	5.00	2.50	99
34	Hiu 15	Tahuna	5.00	5.00	4.30	10.00	2.50	2.50	60.00	5.00	4.40	5.00	99
Total													3256.50
Rata-Rata													95.78

Keterangan nama alat:

1. Peralatan navigasi
2. Peralatan komunikasi
3. Perlengkapan keselamatan dan pemadam kebakaran
4. Konstruksi kapal
5. Perlengkapan tambat labuh
6. Pendingin ruangan
7. Mesin utama
8. Mesin bantu
9. Sistem propulsi dan kemudi
10. Sistem perpipaan

Kesiapan Prasarana Pengawasan SDKP berupa: gedung bangunan (kantor, Mess, dermaga, gudang, tempat penampungan sementara/DTC dan gedung serbaguna). Nilai capaian bersifat kumulatif dengan metode penilaian mandiri internal Ditjen PSDKP terhadap struktur, arsitektur, mekanikal dan elektrik bangunan. Kriteria kesiapan terbagi menjadi tiga, yaitu: nilai ≤ 75 adalah tidak siap, nilai 76 -95 adalah siap, dan nilai 96-100 adalah sangat siap. Penilaian kesiapan dilakukan secara bertahap.

Pada tahun 2025, penilaian dilakukan pada 7 (tujuh) UPT Ditjen PSDKP karena operasional Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan baru berjalan pada semester 2. Adapun rincian penilaian sebagai berikut:

Tabel 14. Penghitungan indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP

NO	Jenis Prasarana	Jumlah Lokasi UPT / Objek	Tahun 2025							Rata2	Bobot kesiapan jenis bangunan	Indeks per jenis bangunan	Indeks Kesiapan
			Ambon	Biak	Pontianak	Lampulo	Kupang	Tahuna	Tarakan				
Bobot keakuratan/ verifikasi data dilapangan			85	85	85	85	85	85	100	87,14			
1	Kantor	7	93,00	83,33	92,00	99,50	87,17	82,42	98,33	90,82	30,00	27,25	
2	Mess	7	99,50	99,50	95,00	99,50	92,20	94,92	98,80	97,06	25,00	24,27	
3	Dermaga	1			98,50					98,50	20,00	19,70	
4	Gudang	3	75,00		99,50	99,50				91,33	15,00	13,70	
5	DTC	5			88,00	90,00	87,68	89,54	80,00	87,04	10,00	8,70	
Total Indeks Kesiapan												81,58	

Terjadinya penurunan capaian dari tahun sebelumnya yaitu adanya efisiensi anggaran. Namun demikian kesiapan sarana dan prasarana tetap dilakukan dengan supervisi secara berkala terhadap sarana dan prasarana yang ada.

SASARAN PROGRAM 4

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENANGANAN PELANGGARAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

IKU 7 INDEKS PENEGAKAN HUKUM SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tabel 14. Target dan capaian IKU Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan

Realisasi Tahun 2021-2024				Tahun 2025			Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	%	Target 2029	% Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	-	80	92,33	115,41	84	109,92

Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2025 terealisasi sebesar 92,33 atau tercapai 115,41% dari target sebesar 80. Indeks ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena merupakan indikator yang baru. Namun, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029 sebesar 84, maka capaian tahun 2025 telah mencapai 109,92%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan telah melampaui target yang ditetapkan, baik target tahunan maupun target akhir Renstra.

Indeks Penegakan Hukum Sektor Kelautan dan Perikanan adalah indikator kinerja untuk mengukur tingkat efektivitas penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan, baik melalui penegakkan hukum pidana (penyidikan) maupun pengenaan sanksi administratif yang dilakukan oleh PPNS Perikanan, Pengawas Perikanan, dan Pengawas Kelautan/Polsus PWP3K dalam rangka menjamin kepastian hukum, perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan, serta mendukung ekonomi biru.

Untuk menghitung upaya penegakan hukum dilakukan berdasarkan dua komponen pembentuk yaitu (1) Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Sektor Kelautan dan Perikanan dan (2) Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Sektor Kelautan dan Perikanan.

Formula

$$xp = ((X1 + X2)) / n$$

xp : Indeks Penegakan Hukum Sektor Kelautan dan Perikanan

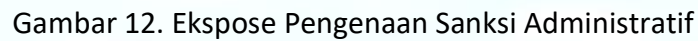
$X1$: Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Sektor Kelautan dan Perikanan

$X2$: Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Sektor Kelautan dan Perikanan

n : Nilai yang menunjukkan banyaknya X

Tabel 16. Penghitungan capaian indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan

Komponen	Indeks
Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana sektor kelautan dan perikanan	92,43
Indeks pengenaan sanksi administratif sektor kelautan dan perikanan	92,23
Capaian indeks kinerja	92,33



Tabel 17. Penghitungan capaian indeks penyelesaian penyidikan TPKP

Tabel 18. Rincian jumlah tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani pada tahun 2025

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

Adapun indeks pengenalan sanksi administratif sektor kelautan dan perikanan merupakan indeks yang terbangun atas persentase pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan serta persentase kewajiban pelaku usaha atas pengenalan sanksi administratif dengan rincian capaian sebagai berikut:

Tabel 19. Penghitungan capaian indeks pengenalan sanksi administratif sektor KP

Komponen	Nilai	Bobot	Indeks
% pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	88,90	70%	62,23
% penyelesaian tindak lanjut pengenalan sanksi administratif	100	30%	30
Total			92,23

Persentase pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan diperoleh dari rata-rata nilai capaian pengenalan sanksi administratif kelautan dan perikanan sistem pemantauan kelautan dan perikanan (SPKP) dan nilai capaian pengenalan sanksi administratif kelautan dan perikanan non-sistem pemantauan kelautan dan perikanan (Non-SPKP).

Tabel 20. Persentase pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan

Keterangan	Capaian pengenalan sanksi administratif KP SPKP	Capaian pengenalan sanksi administratif KP Non-SPKP	Indeks
Nilai Pusat dan UPT	77,80	100	88,90

Pada tahun 2025, jumlah pengenalan sanksi administratif kelautan dan perikanan sebanyak 4.104 dengan rincian sebanyak 2.550 adalah sanksi administratif kelautan dan perikanan SPKP dan 1.554 merupakan sanksi administratif kelautan dan perikanan non SPKP.

Tabel 21. Pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan SPKP

NO	UPT	JUMLAH	ANALISIS LANJUTAN		TINDAK LANJUT						Capaian Pengenaan Sanksi Administratif KP SPKP
			DALAM PROSES	SUDAH	SURAT PEMANGGILAN	BUKAN PELANGGARAN	BAP	SP1	SP2	DENDA	
1	Lampulo	154	0	154	20	38	37	57	0	2	62.99
2	Batam	136	0	136	2	79	3	46	6	0	96.32
3	Jakarta	791	3	788	95	65	215	342	53	18	60.43
4	Benoa	164	12	152	12	81	0	55	4	0	85.37
5	Bitung	146	0	146	45	60	2	28	7	4	67.81
6	Tual	164	14	150	23	28	6	84	5	4	73.78
7	Cilacap	816	0	816	12	35	46	720	0	3	92.89
8	Belawan	85	7	78	0	0	9	62	0	7	81.18
9	Kupang	6	0	6	0	0	0	6	0	0	100.00
10	Pontianak	54	0	54	0	17	0	37	0	0	100.00
11	Tarakan	8	0	8	0	1	0	5	2	0	100.00
12	Tahuna	2	0	2	0	0	0	2	0	0	100.00
13	Ambon	17	2	15	0	3	0	12	0	0	88.24
14	Biak	7	0	7	0	5	1	0	0	1	85.71
Total		2550	38	2512	209	412	319	1456	77	39	77.80

Tabel 22. Pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Non-SPKP

No	UPT	Sanksi Adm SDK					Sanksi Adm SDP				Jumlah Kasus Pelanggaran Administratif KP	Capaian Pengenaan Sanksi Administratif KP Non SPKP
		SP1	SP2	SP3	Paksaan Pemerintah	Denda	SP1	SP2	Paksaan Pemerintah	Denda		
1	LAMPULO	24	4	2		2	15			4	51	100
2	BATAM	212	30			18	16	1		1	278	100
3	JAKARTA	128	5		3	12	16	1	1	25	191	100
4	BENDO	221	49	2	2	10	45	2	17	16	364	100
5	BITUNG	136	27		3	32	17		8	2	225	100
6	TUAL	20				3	17	1	4	33	78	100
7	OLACAP	20				1	39	1	4	5	70	100
8	BELAWAN	27	3	1		5	6			5	47	100
9	KUPANG	25	1			2	7			1	36	100
10	PONTIANAK	3				3	24	2	3	17	52	100
11	TARAKAN	62	9		1	7	6		7	4	96	100
12	TAHUNA	0					1		1	1	3	100
13	AMBON	26			1	11	9		1	7	55	100
14	BIAK	2				1				3	6	100
Total		906	128	5	10	109	218	8	46	124	1554	100

Lebih lanjut, persentase tindak lanjut pengenaan sanksi administratif sebesar 100% diperoleh dari perhitungan jumlah permohonan penerbitan billing sanksi administratif dibandingkan dengan jumlah penetapan denda sanksi administratif.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, di antaranya:

1. Seluruh penetapan denda administratif yang disusun oleh Direktorat Penanganan Pelanggaran telah melalui proses ekspose dengan melibatkan pihak eksternal. Namun demikian, masih terdapat sejumlah jenis pelanggaran yang belum memiliki ketentuan pengenaan denda administratif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Kondisi ini menimbulkan kesan kurang adil serta menyulitkan pengawas perikanan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
2. Denda administratif dan/atau ganti kerugian yang telah ditetapkan terkadang tidak dapat tertagih, terutama apabila Pelaku Usaha tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran atas penetapan denda maupun billing PNBP yang telah diterbitkan oleh Ditjen PSDKP.

SASARAN PROGRAM 5

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL DALAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

IKU 8. NILAI IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI LINGKUP DITJEN PSDKP

Tabel 23. Target dan realisasi IKU Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP

Realisasi Tahun 2021-2024					Tahun 2025		Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	%	Target 2029	% Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	-	86	91,76	106,70	88	104,27

Realisasi indikator ini sebesar 91,76 atau tercapai sebesar 104,85% dari target tahun 2025 sebesar 86. Hal ini mencerminkan bahwa implementasi reformasi birokrasi pada Ditjen PSDKP termasuk sangat baik. Capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena merupakan indikator yang baru. Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2025-2029, maka telah melampaui target yang ditetapkan dengan capaian 104,27%.

Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dilaksanakan melalui dua kategori utama, yaitu Reformasi Birokrasi (RB) General dan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik. RB General berfokus pada pembangunan tata kelola birokrasi internal (hulu), yang mencakup penguatan sistem manajemen, akuntabilitas, integritas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, RB Tematik diarahkan pada penyelesaian masalah tata kelola dalam program prioritas nasional, khususnya pengentasan kemiskinan sebagaimana dimandatkan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022.

Dalam konteks tersebut, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) tidak termasuk unit kerja yang ditunjuk secara langsung dalam pelaksanaan RB Tematik, mengingat tugas dan fungsi yang dimiliki lebih berorientasi pada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, capaian Ditjen PSDKP lebih difokuskan pada implementasi RB General.

Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi merupakan indikator yang mengukur implementasi reformasi birokrasi general pada Unit Organisasi Eselon I di lingkungan KKP. Nilai diperoleh dari hasil evaluasi seluruh indikator pembentuk yang terdiri dari akuntabilitas kinerja dan keuangan, pembangunan integritas, profesionalitas ASN, pelayanan publik, reformasi hukum, tata laksana, kearsipan, dan pengadaan barang/jasa.

Capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi Ditjen PSDKP mendapatkan nilai sempurna/optimum atau pada 4 (empat) indikator kinerja mandatori dalam bidang keuangan dan hukum yaitu persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan, batas tertinggi nilai temuan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan, Persentase rencana umum Pengadaan Barang dan Jasa, dan persentase penyelesaian program penyusunan peraturan menteri dan keputusan menteri di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Hal ini menunjukkan responsivitas tinggi unit kerja terhadap hasil audit, pengawasan eksternal, dan pengelolaan PBJ secara transparan, serta komitmen unit kerja untuk menyelesaikan penyusunan kebijakan.

Capaian tinggi atau nilai indikator 90 ke atas, diperoleh pada indikator mandiri nilai PM SAKIP sebesar 9,00, nilai IKPA sebesar 9,35, nilai maturitas struktur dan proses SPIP sebesar 9,41, nilai pengawasan kearsipan internal sebesar 9,35. Hasil tersebut menunjukkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program berbasis kinerja, menandakan sistem pengendalian

internal berjalan efektif dan sistem pengendalian intern pemerintah yang telah mencapai tingkat maturitas tinggi, serta pengelolaan arsip yang tertib, sesuai standar, dan mendukung transparansi informasi.

Terkait pembangunan integritas dan tata laksana dengan hasil capaian IKU 82,24 (nilai indikator 4,11), dan persentase penyelesaian proses bisnis level 2 dan level 3 dan SOP unit eselon I dengan capaian IKU 3,50 (nilai indikator 3,50) perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut agar budaya integritas melalui program internalisasi nilai-nilai anti korupsi dan peningkatan kepemimpinan berintegritas semakin meningkat dan perlu percepatan penyusunan dan implementasi SOP untuk memastikan konsistensi pelaksanaan tugas dan fungsi.

C. EFISIENSI

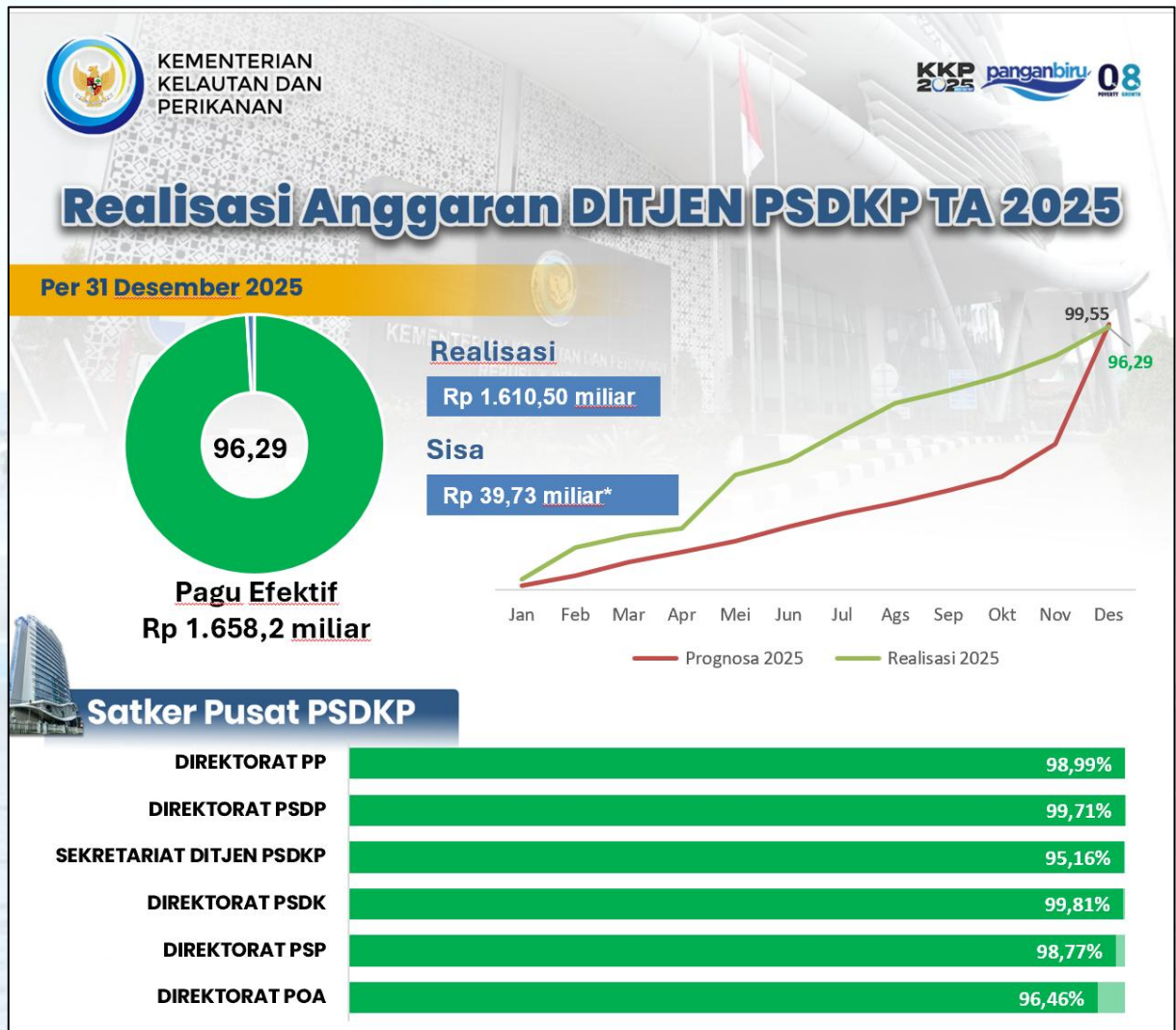
Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien, telah dilakukan upaya penyederhanaan dan efisiensi atas pemanfaatan sumber daya lingkup Ditjen PSDKP, antara lain:

1. Optimalisasi penggunaan media daring (*zoom*) untuk rapat, supervisi, sosialisasi lingkup Ditjen PSDKP. Beberapa kegiatan tahun 2025 yang menggunakan media daring antara lain: a) kegiatan penyadartahuan pelaku usaha pembudidayaan ikan diikuti oleh 367 peserta; b) Supervisi pembinaan Pokmaswas di 34 Provinsi; c) pembinaan pengawasan SDKP kepada pemerintah daerah; d)ekspose penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan.
2. Pengurangan belanja bahan, pencetakan dan konsumsi. Pemanfaatan aplikasi *collaboration office* (www.portal.kkp.go.id) dalam korespondensi, sehingga menghemat biaya cetak dokumen dan memangkas waktu disposisi dari pimpinan kepada pegawai.
3. Total efisiensi Ditjen PSDKP tahun 2025 mengacu nilai efisiensi SBK pada laman monev.kemenkeu.go.id adalah sebesar 42,15. Efisiensi SBK mengacu pada upaya untuk mencapai keluaran atau hasil yang direncanakan dengan biaya yang lebih rendah, atau dengan kata lain, mendapatkan hasil yang maksimal dari anggaran yang tersedia untuk kegiatan tertentu. Hal ini melibatkan penggunaan anggaran yang optimal dan menghindari pemborosan dalam pelaksanaan kegiatan yang diatur oleh SBK.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Alokasi anggaran Ditjen. PSDKP TA. 2025 sebesar Rp. 1.672.603.377.000,-. Dari total anggaran tersebut, Ditjen PSDKP mendapat alokasi blokir anggaran sebesar Rp.14,323,360,000,- sehingga total pagu efektif ditjen PSDKP adalah sebesar

Rp.1.658.280.017.000,-. Anggaran tersebut didistribusikan pada 6 (enam) unit kerja pada satker pusat, 14 (empat belas) UPT Pengawasan SDKP. Realisasi Anggaran Ditjen. PSDKP Tahun 2025 sebesar **Rp. 1.610.505.791.642,- (96,29%)** dengan outstanding kontrak sebesar Rp 8.041.663.170,-



Gambar 13. Infografis anggaran Ditjen PSDKP

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Ditjen PSDKP menetapkan 5 (lima) Sasaran Program dan 8 (delapan) Indikator Kinerja yang terdiri dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 1 (satu) Indikator Kinerja Manajemen (IKM) yang menjadi target Ditjen. PSDKP di tahun 2025. Nilai Kinerja Organisasi Ditjen PSDKP Tahun 2025 sebesar **111,56** dengan kategori **istimewa** yang menunjukkan tercapainya seluruh indikator kinerja yang diperjanjikan.

Kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2025 tercapai sangat baik merupakan kontribusi dari seluruh pihak yang bekerja keras dalam melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencapaian kinerja tersebut bukan tanpa kendala atau hambatan pada pelaksanaannya, sehingga perlu disusun langkah-langkah perbaikan kedepan sebagaimana diuraikan bagian B.

B. LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, Ditjen PSDKP perlu melakukan langkah-langkah:

1. Meningkatkan kapasitas SDM Ditjen PSDKP dalam melakukan analisis data hasil pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Penyebaran informasi pengawasan SDKP secara masif kepada masyarakat memanfaatkan media sosial dan meningkatkan edukasi kepada para pelaku usaha kelautan dan perikanan;
3. Mengoptimalkan pengawasan berbasis teknologi, integrasi dengan command center dan memanfaatkan data intelijen;
4. Melaksanakan operasi intelijen dalam mengoptimalkan pengawasan SDKP.

LAMPIRAN

PK DITJEN PSDKP TAHUN 2025 (AWAL)



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Pung Nugroho Saksono**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Januari 2025

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Pung Nugroho Saksono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan	1	Indeks kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan (indeks)	80
		2	Persentase keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	90
		3	Tingkat keterlibatan masyarakat (Engagement Rate) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	>1
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	4.	Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (indeks)	82
3	Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	5.	Indeks operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	92
		6.	Indeks kesiapan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	80
4	Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	7.	Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan (indeks)	80
5	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen PSDKP	8.	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	86

Data Anggaran :

PROGRAM/KEGIATAN		Anggaran (Rp.)
PROGRAM : Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		
1	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	431.324.035.000
2	Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan	10.590.000.000
3	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	37.364.288.000
4	Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	10.934.487.000
PROGRAM : Dukungan Manajemen		
1	Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen PSDKP	336.895.953.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025		827.108.763.000

Jakarta, 17 Januari 2025

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Pung Nugroho Saksono

PK DITJEN PSDKP TAHUN 2025 (AKHIR)



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Pung Nugroho Saksono**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

PIHAK PERTAMA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Pung Nugroho Saksono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1.	Meningkatnya kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan	1.	Indeks kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan (indeks)	80
		2.	Nilai keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	90
		3.	Tingkat keterlibatan masyarakat (<i>Engagement Rate</i>) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	>1
2.	Meningkatnya efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	4.	Indeks pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	75
3.	Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	5.	Indeks operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	92
		6.	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	80
4.	Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	7.	Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan (indeks)	80
5.	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel di lingkungan Ditjen PSDKP	8.	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	86

Data Anggaran :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	1.378.659.531.000
	a. Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	1.364.743.768.000
	b. Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan	3.118.369.000
	c. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	10.472.904.000
	d. Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	324.490.000
2.	Program Dukungan Manajemen	293.943.846.000
Total Anggaran Ditjen PSDKP Tahun 2025		1.672.603.377.000

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

PIHAK PERTAMA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Pung Nugroho Saksono



**Direktorat Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tahun 2025**